

## ANALISIS REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI SUMATERA BARAT

Muhammad Fajri Zalmi<sup>1</sup>, Rivdya Eliza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia

E-mail: [fzalmi@gmail.com](mailto:fzalmi@gmail.com); [rivdyaeliza@uinib.ac.id](mailto:rivdyaeliza@uinib.ac.id)

**ABSTRAK.** Pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks otonomi daerah, realisasi anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara nyata. Efektivitas pengelolaan anggaran daerah merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Realisasi fisik dan keuangan mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan capaian realisasi fisik dan keuangan di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dan 2) menganalisis pencapaian tersebut guna memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, dan observasi lapangan. Penelitian dilakukan dari awal hingga akhir tahun 2024. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pencapaian serta pola realisasi anggaran di setiap daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata realisasi fisik pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mencapai 95,18%, sementara realisasi keuangan mencapai 91,28%. Untuk realisasi fisik, Kota Padang memiliki capaian tertinggi (99,06%) dan Kabupaten Solok Selatan menjadi yang paling sedikit melakukan realisasi fisik (85,91%). Sementara itu untuk realisasi keuangan, Kabupaten Solok memiliki capaian tertinggi dalam realisasi keuangan (95,82%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki capaian terendah (82,74%). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antar daerah dalam menyerap dan mengelola anggaran, yang berpotensi memengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan daerah masing-masing. Tingginya capaian di beberapa daerah mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan capaian rendah mengindikasikan hambatan sistemik seperti lemahnya koordinasi, perencanaan yang tidak matang, atau keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** realisasi fisik, realisasi keuangan, pengelolaan anggaran, efektivitas pemerintah daerah.

## ANALYSIS OF PHYSICAL AND FINANCIAL REALIZATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN WEST SUMATRA

**ABSTRACT.** Sustainable regional development depends on effective and targeted budget management. In the context of regional autonomy, budget realization is not just an administrative matter, but a reflection of the ability of local governments to implement real development programs. The effectiveness of local budget management is a key indicator in assessing government performance at the regency and city levels. Physical and financial realization reflects the extent to which planned programs and activities have been implemented according to the set targets. This study aims to: 1) describe the achievements of physical and financial realization in 19 districts and cities in West Sumatra Province in 2024 and 2) analyze these achievements to provide recommendations for policy makers. This research uses a quantitative descriptive method with data collection techniques through documentation studies, structured interviews, and field observations. This study was conducted from the beginning to the end of 2024. The collected data were analyzed with descriptive statistics to describe the level of achievement and the pattern of budget realization in each region. The results showed that the average physical realization in 19 districts/cities in West Sumatra Province reached 95.18%, while the financial realization reached 91.28%. For physical realization, Padang City had the highest achievement (99.06%) and South Solok Regency had the lowest physical realization (85.91%). Meanwhile, for financial realization, Solok Regency has the highest financial realization achievement (95.82%), while Mentawai Islands Regency has the lowest (82.74%). These differences indicate inequalities in the capacity of regions to absorb and manage budgets, potentially affecting the pace and quality of their development. High achievements in some regions reflect effectiveness in program planning and implementation, while low achievements indicate systemic obstacles such as weak coordination, poor planning, or limited human resources. These findings emphasize the importance of a thorough evaluation of the budget planning and implementation process in order to support more equitable and sustainable regional development.

**Keywords:** *physical realization, financial realization, budget management, local government effectiveness.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah merupakan aspek krusial dalam pembangunan kabupaten dan kota di Indonesia. Efektivitas realisasi fisik dan keuangan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2018). Realisasi fisik mengacu pada tingkat pencapaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi keuangan mengukur persentase anggaran yang telah digunakan dari total alokasi anggaran yang tersedia (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam konteks pembangunan daerah, realisasi fisik dapat dijelaskan sebagai pencapaian output yang diukur dalam bentuk hasil nyata dari proyek atau program pembangunan yang telah dirancang (Kuncoro, 2021), sedangkan realisasi keuangan mencerminkan jumlah dana yang telah dibelanjakan dibandingkan dengan total anggaran yang disediakan (Bastian, 2019). Keseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Setyowati, 2020).

Di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, terdapat variasi dalam capaian realisasi fisik dan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain: 1) kapasitas manajerial Pemerintah Daerah; kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas realisasi fisik dan keuangan (Rivan and Maksum, 2019); 2) kebijakan dan regulasi; aturan yang jelas mengenai penggunaan anggaran dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan pembangunan (Permendagri No. 77 Tahun 2020); 3) tingkat partisipasi masyarakat: keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan turut menentukan keberhasilan realisasi anggaran (Putri dan Santoso, 2023); 4) Kondisi Infrastruktur dan Geografis; Faktor geografis seperti aksesibilitas dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pembangunan (Suharyanto, 2021).

Meskipun banyak daerah menunjukkan capaian realisasi yang tinggi, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi anggaran, antara lain: 1) penyerapan anggaran yang tidak merata, dimana beberapa daerah memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah akibat lambatnya proses administrasi dan birokrasi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023); 2) ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, yaitu terdapat perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan proyek pembangunan tidak berjalan sesuai target (Syafrizal, 2020); 3) masalah transparansi dan akuntabilitas, dalam hal ini kurangnya pengawasan dan kontrol dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran daerah (Mardiasmo, 2018).

Untuk Provinsi Sumatera Barat, terdapat 19 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik berbeda dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian realisasi fisik dan keuangan di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan capaian antardaerah. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah tentang bagaimana realisasi fisik dan realisasi keuangan di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan hasil tersebut. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis realisasi fisik dan keuangan di Provinsi Sumatera Barat yang belum banyak diteliti secara komprehensif, khususnya di 19 kabupaten/kota dengan karakteristik yang berbeda. (Setyowati 2020) menyatakan bahwa analisis deskriptif terhadap data ini tetap penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi anggaran di setiap daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mendukung pemerataan pembangunan di masa mendatang.

ANALISIS REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI SUMATERA BARAT

*Muhammad Fajri Zalmi, Rivdya Eliza*

## KERANGKA PEMIKIRAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada efektivitas realisasi fisik dan keuangan. (Bappenas, 2021) menetapkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari seberapa jauh hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan suatu proyek pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti regulasi, kesiapan sumber daya manusia, kondisi cuaca, dukungan pemangku kepentingan, serta kualitas perencanaan. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan realisasi fisik, yaitu pelaksanaan nyata dari kegiatan seperti pembangunan infrastruktur. Realisasi fisik yang berjalan baik idealnya seiring dengan realisasi keuangan, yakni tingkat penggunaan anggaran sesuai rencana. Kombinasi keduanya menghasilkan output pembangunan, berupa infrastruktur atau layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Akhirnya, keberhasilan proyek diukur dari dampaknya bagi masyarakat, seperti meningkatnya akses terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, dan perbaikan kualitas hidup secara umum. Untuk menggambarkan hubungan antara realisasi fisik dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat, dapat disusun model konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Hubungan antara Realisasi Fisik dan Keuangan**

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap realisasi fisik dan keuangan guna memastikan keselarasan antara anggaran yang digunakan dan output pembangunan yang dihasilkan. Realisasi fisik tentu saja berhubungan dengan realisasi keuangan. Realisasi fisik mencerminkan kemajuan pekerjaan di lapangan, sedangkan realisasi keuangan menunjukkan sejauh mana anggaran telah dicairkan dan digunakan. (Kementerian Keuangan, 2022) menegaskan bahwa keseimbangan antara kedua indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pembangunan. Ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan dapat menjadi indikasi permasalahan.

Evaluasi terhadap kedua aspek ini memiliki beberapa manfaat utama, di antaranya: 1) dengan menelaah realisasi fisik dan keuangan, pemerintah daerah dapat mengukur keberhasilan proyek dan mengidentifikasi penyebab keterlambatan dalam pelaksanaan (Todaro and Smith, 2021); 2) pemantauan yang ketat mencegah pemborosan dan memastikan anggaran digunakan untuk kegiatan yang produktif (Mardiasmo, 2018); 3) teridentifikasinya kendala atau faktor-faktor seperti hambatan birokrasi, kurangnya tenaga kerja terampil, dan cuaca ekstrem yang menjadi penyebab keterlambatan proyek pembangunan (World Bank, 2020); 4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan yang baik terhadap realisasi anggaran. Hal ini tentu saja dapat mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (OECD, 2019); 5) Perencanaan pembangunan berbasis data dapat dilakukan melalui evaluasi secara berkala sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan lebih realistis untuk tahun-tahun mendatang (UNDP, 2021).

## METODE

Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program pembangunan di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Menurut (Sugiyono, 2020), pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber guna memberikan gambaran objektif mengenai tingkat pencapaian pembangunan di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah kegiatan pembangunan yang tercakup dalam laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan di setiap 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Adapun objek penelitian adalah data realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilaporkan setiap bulan, yang akan dianalisis untuk melihat hubungan, kecenderungan, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di setiap 19 kabupaten/kota tersebut.

Penelitian dilakukan pada tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: 1) studi dokumentasi; mengumpulkan dan menganalisis laporan resmi tiap bulan selama tahun 2024 mengenai realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kabupaten/kota (Creswell, 2018), laporan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen perencanaan dan evaluasi dari pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Data yang berasal dari studi dokumentasi merupakan data sekunder; 2) wawancara terstruktur: dilakukan dengan pejabat pemerintah terkait untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran. Pejabat pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan (Moleong, 2019), (Yin, 2014). Data yang bersumber dari wawancara ditetapkan sebagai data primer; 3) observasi: mengamati langsung proyek pembangunan selama tahun 2024 di beberapa daerah sebagai sampel untuk mengonfirmasi kesesuaian realisasi fisik dengan laporan yang tersedia. Data observasi pada penelitian ini juga ditetapkan sebagai data primer.

Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik: 1) statistik deskriptif, yaitu menghitung persentase realisasi fisik dan keuangan, serta membandingkannya antar kabupaten/kota untuk melihat pola dan kecenderungan (Sugiyono, 2020). Alat bantu yang digunakan untuk kepentingan ini aplikasi *Microsoft Excel*; 2) membandingkan capaian: membandingkan hasil realisasi fisik dan keuangan antar daerah guna mengidentifikasi daerah dengan kinerja terbaik dan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023); 3) menginterpretasikan data yang diperoleh: menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan dalam capaian realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi (Creswell, 2018).

Berdasarkan standar yang sering digunakan dalam evaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah, kategori pencapaian menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2023) adalah seperti pada Tabel 1:

**Tabel 1. Kriteria Persentase Pencapaian Realisasi Fisik dan Keuangan**

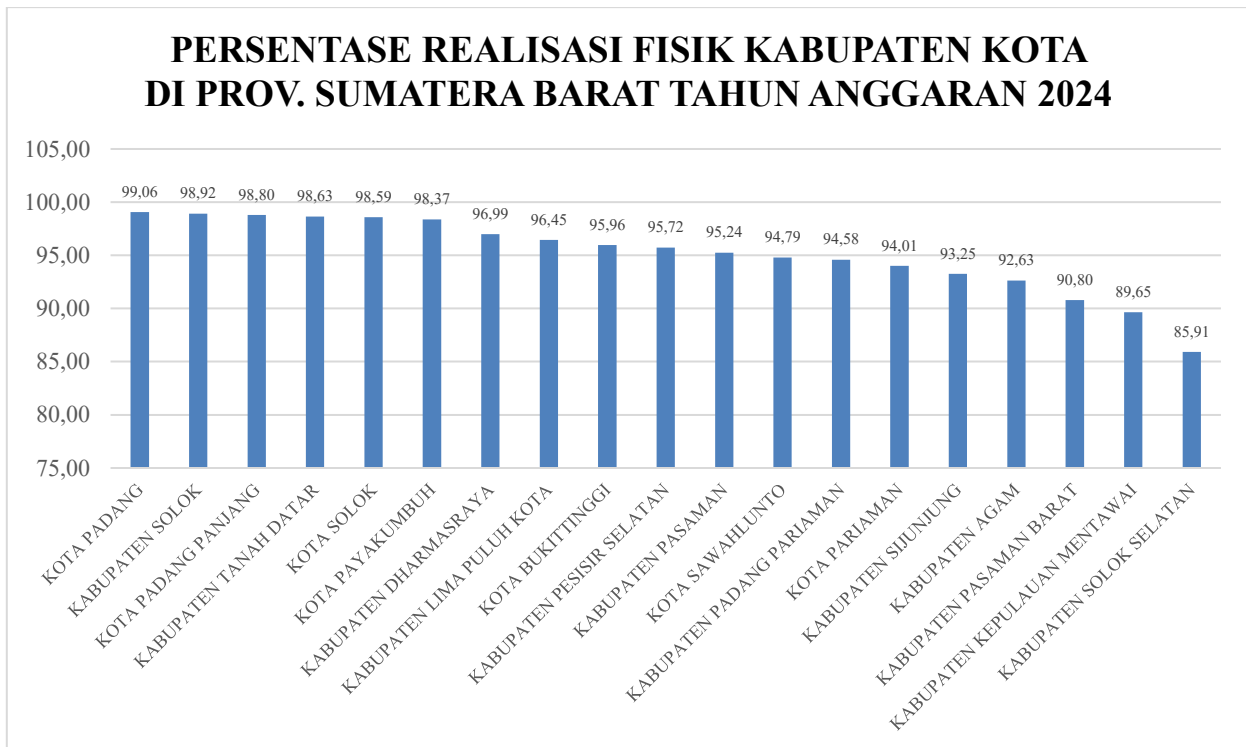
| No. | Persentase           | Kriteria      | Keterangan                                                                                                             |
|-----|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $x > 90\%$           | Sangat Baik   | program dan kegiatan telah terlaksana hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.            |
| 2   | $80\% < x \leq 90\%$ | Baik          | pencapaian yang tinggi, meskipun ada sedikit deviasi dari target yang direncanakan.                                    |
| 3   | $70\% < x \leq 80\%$ | Cukup         | mengindikasikan bahwa sebagian besar program telah berjalan, tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi |
| 4   | $60\% < x \leq 70\%$ | Kurang        | realisasi yang rendah, dengan banyak program atau kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi sesuai rencana            |
| 5   | $\leq 60\%$          | Sangat kurang | sebagian besar program belum berjalan dengan baik atau mengalami hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya         |

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023)

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, hasil wawancara, dan observasi langsung di lapangan (Moleong, 2019). Selain itu, uji konsistensi dilakukan dengan membandingkan laporan realisasi fisik dan keuangan dari tahun sebelumnya guna memastikan adanya pola yang berulang atau perubahan yang signifikan (Yin, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh 19 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat realisasi fisik dalam bentuk grafik persentase seperti yang terlihat pada Gambar 2 berikut:



**Gambar 2. Laporan Realisasi Fisik dari Seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2024**

Berdasarkan gambar 2 di atas, diketahui realisasi fisik dari pelaksanaan pembangunan tergolong tinggi, berkisar antara 85,91% hingga 99,06 %. Melihat dari rentang persentasenya maka angka ini variatif, meskipun secara rata-rata persentase realisasi fisik selama tahun 2024 adalah 95,18% tergolong sangat baik. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota sudah berhasil mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada kota dan kabupaten dengan realisasi fisik tertinggi dan terendah saja.

Kota Padang menjadi yang tertinggi di dalam merealisasikan pembangunan fisik yaitu sebesar 99,06%. Angka ini menunjukkan bahwa di kota Padang, hampir seluruh bagian dari rencana pembangunan fisik telah tercapai dan eksekusi pembangunan telah berjalan sangat baik, dengan sedikit sekali hambatan atau keterlambatan. Dalam konteks pembangunan kota, angka ini dapat mencerminkan tingkat efektivitas dalam manajemen proyek, pengelolaan sumber daya, dan koordinasi antarpihak terkait (Kerzner, 2025). Hasil wawancara dengan kepala bagian pembangunan beserta pejabat fungsional pada bagian administrasi pembangunan juga menegaskan hal yang serupa, bahwa sepanjang tahun 2024 faktor-faktor sumber daya seperti, pendanaan, tenaga kerja, material, dan teknologi di Kota Padang sudah memadai. Petugas lapangan juga merasa dimudahkan dari segi pembentukan kebijakan yang mendukung, kemudahan perizinan, dan kemudahan kolaborasi dengan sektor swasta atau masyarakat yang memang berperan besar dalam mempercepat realisasi fisik. Selain itu, pelaksanaan realisasi fisik di Kota Padang juga selalu diawasi dengan ketat guna memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai jadwal dan memiliki kualitas yang diharapkan. Kenyataan ini membuktikan bahwa proyek yang hampir 100% biasanya merupakan proyek yang memiliki sumber daya yang cukup dan pengelolaan yang sangat terorganisasi dengan baik (Meredith et al., 2017).

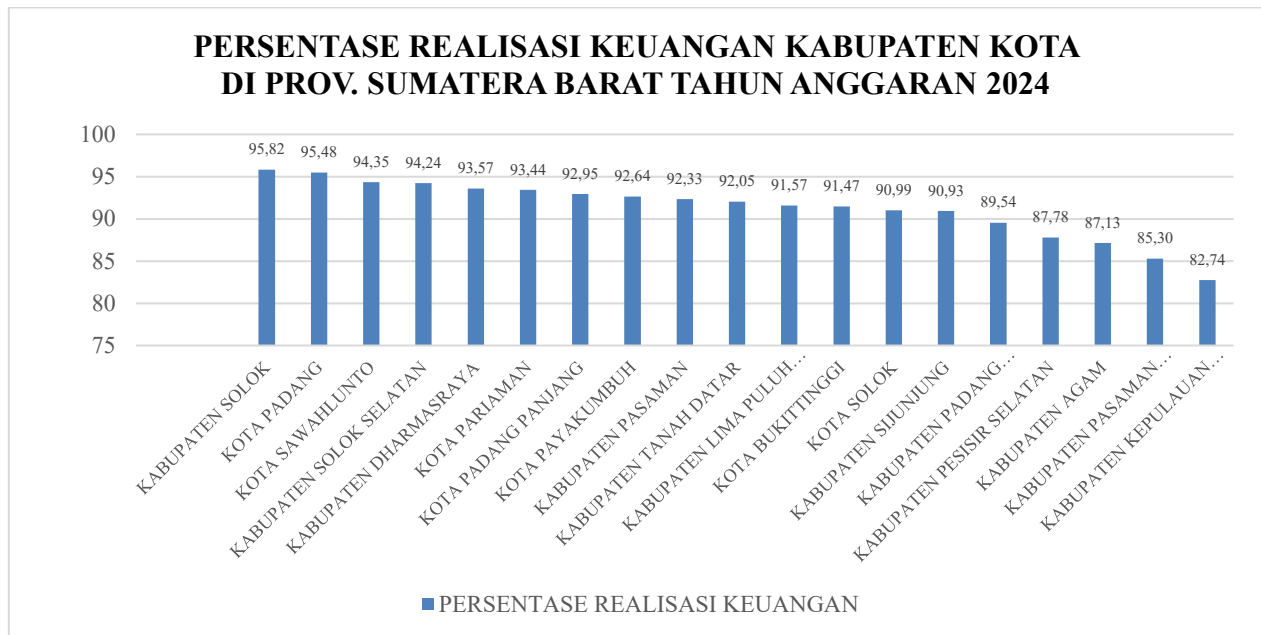
Untuk realisasi fisik dengan persentase terendah pada tahun 2024 adalah Kota Solok Selatan. Dengan nilai 85,91%, Solok Selatan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama jika kita bandingkan dengan kota-kota lain yang lebih tinggi. Hasil wawancara dengan kepala bagian pembangunan beserta pejabat fungsional pada bagian administrasi pembangunan di Kabupaten Solok Selatan, ada beberapa tantangan dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud termasuk sumber daya manusia, alat dan bahan. Jumlah sumberdaya manusia pengelola pelaksanaan pembangunan dan pengelola anggaran kurang, bahkan beberapa personil ada yang harus rangkap jabatan agar sebuah pekerjaan lancar. Jarak yang jauh dari ibukota provinsi juga merupakan faktor yang disebutkan sebagai kendala dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan. Hasil wawancara ini juga dibenarkan oleh (Cicmil et al., 2006) bahwa tantangan yang dihadapi oleh setiap kota dalam pelaksanaan pembangunan fisik tidak selalu sama. Penjelasan ini mendukung asumsi bahwa perbedaan geografis, ekonomi, dan sumber daya yang tersedia dapat memengaruhi kecepatan dan keberhasilan suatu proyek pembangunan kota. Sejalan dengan itu (Radiansyah et al., 2023) juga menegaskan penting dipahami bahwa memahami faktor eksternal dalam mengelola proyek pembangunan di setiap kabupaten dan kota berbeda. Kota dengan realisasi fisik lebih rendah bisa jadi terpengaruh oleh tantangan eksternal yang lebih besar, yang tidak mudah diatasi.

Namun, perlu diingat bahwa meskipun nilai realisasi fisik dari seluruh kabupaten dan kota mendekati 100%, menurut (Cicmil et al., 2006), (Kerzner, 2025) pihak terkait harus memikirkan kemungkinan beberapa aspek yang belum sepenuhnya terealisasi, misalnya dalam hal penyelesaian dokumen administrasi, pembenahan pasca-pembangunan, atau evaluasi akhir. Proyek pembangunan kota biasanya melibatkan banyak elemen yang saling terkait, sehingga 0,94% yang belum tercapai di Kota Padang bisa jadi merupakan bagian kecil yang masih membutuhkan penyelesaian. Walaupun tampaknya hanya sedikit, namun penting untuk memastikan bahwa bagian yang tersisa ini benar-benar ditangani dengan baik. Lebih lanjut (Kerzner, 2025) menyatakan bahwa kemungkinan yang terjadi adalah: 1) ada bagian proyek yang masih tertunda karena urusan administrasi, seperti izin bangunan, pembebasan lahan, atau dokumen terkait lainnya; 2) proyek pembangunan kota menghadapi masalah dengan masyarakat setempat, seperti penolakan terhadap proyek tertentu atau kesulitan dalam kolaborasi; 3) ada bagian yang kurang terpantau secara intensif, seperti detail pekerjaan atau *quality control* di lapangan; dan 4) pengerjaan minor yang belum selesai dengan baik. Ini bisa termasuk perbaikan kecil pada infrastruktur atau fasilitas umum, seperti jalan yang belum dipoles akhir, area taman yang belum sepenuhnya dipasang perlengkapan, atau penerangan jalan yang belum sepenuhnya terpasang.

Sejalan dengan itu (Müller and Jugdev, 2012) menyarankan untuk benar-benar memastikan bahwa komunikasi dengan *stake holder* berjalan dengan baik yang nantinya akan mempercepat penyelesaian proyek. Kadang ada juga elemen sosial atau lingkungan yang perlu diselesaikan di tahap akhir pembangunan. Misalnya, penyelesaian isu lingkungan, seperti rehabilitasi lahan atau pengelolaan sampah yang tidak sempurna, bisa menjadi bagian dari pekerjaan yang tertunda. Atau, mungkin ada kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan komunitas atau kelompok yang terkena dampak pembangunan. (Jha and Iyer, 2006) berpendapat bahwa menjaga tingkat monitoring dan evaluasi yang tinggi selama fase akhir ini sangat penting. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada bagian yang tertinggal, atau masalah kecil yang tidak terlihat bisa segera diidentifikasi dan ditangani (Zwikael and Smyrk, 2011).

Kadang-kadang, meskipun fisik pembangunan sudah hampir selesai, ada dokumentasi atau administrasi yang masih perlu diselesaikan, seperti pengesahan dokumen akhir, laporan keuangan, atau sertifikasi bangunan. Menyelesaikan pekerjaan administratif ini sangat penting untuk menuntaskan proyek dengan sempurna (Baccarini, 1999). Ada kemungkinan bahwa bagian yang tersisa adalah area yang

sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai risiko, namun sekarang perlu penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui manajemen risiko yang ada agar sisa-sisa pekerjaan bisa diselesaikan tanpa gangguan (Radiansyah et al., 2023). Bersamaan dengan ini, deskripsi realisasi keuangan sepanjang tahun 2024 di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Laporan Realisasi Keuangan dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.**

Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa adanya rentang yang cukup besar antara kabupaten/kota dengan realisasi keuangan terendah (82,74% di Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan yang tertinggi (95,82% di Kabupaten Solok). Rentang ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam efektivitas penggunaan anggaran di berbagai daerah. Penyebab perbedaan ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas pengelolaan anggaran, dan faktor geografis yang mempengaruhi implementasi program pembangunan. Jika dilihat dari nilai rata-rata persentase realisasi keuangan sebesar 91,28% maka secara umum, kabupaten/kota di Sumatera Barat cukup efektif dalam melaksanakan program pembangunan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Meskipun ada beberapa yang lebih rendah, mayoritas daerah memiliki tingkat realisasi keuangan yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan adanya pengelolaan keuangan yang baik, dan relatif stabil. Penelitian oleh (Selvia and Arza, 2023) menjelaskan bahwa kinerja anggaran yang baik biasanya berhubungan dengan keberhasilan perencanaan anggaran, partisipasi publik dalam perencanaan, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Perbedaan yang terjadi mengarah pada perbedaan dalam tingkat efisiensi antardaerah. (Baccarini, 1999) menyatakan bahwa perbedaan antara kota-kota tersebut harus tetap dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebab keberagaman hasil.

Persentase realisasi keuangan tertinggi terdapat di Kabupaten Solok. Dengan angka realisasi keuangan sebesar 95,82%, Kabupaten Solok diketahui memiliki pengelolaan keuangan yang sangat baik. Pengelolaan keuangan ini terencana dan dipantau dengan teliti. Terdapat efisiensi dalam alokasi anggaran, pengawasan yang lebih ketat, dan perencanaan yang matang di daerah ini. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dan faktor ekonomi lokal juga seperti sektor pertanian, perdagangan, atau pariwisata yang berkembang baik juga dapat berkontribusi pada capaian ini. (Pratama, Rafdi, dan Patty,



2024) dalam artikel ilmiahnya tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan, efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencapai target realisasi yang tinggi. Pemerintah daerah yang memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel cenderung mencapai realisasi anggaran yang lebih tinggi.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki realisasi keuangan terendah (82,74%) dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera barat menghadapi beberapa tantangan seperti: 1) Kesulitan Infrastruktur dan Logistik: Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi masalah terkait infrastruktur yang buruk atau keterbatasan akses ke layanan keuangan; 2) Keterbatasan Sumber Daya Alam atau Pendapatan: Sebagai daerah kepulauan yang mungkin lebih bergantung pada sektor perikanan atau pariwisata, fluktuasi pendapatan bisa sangat mempengaruhi realisasi keuangan; dan 3) Tantangan Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan: Keterbatasan dalam kapasitas pengelola keuangan atau sumber daya manusia juga dapat memengaruhi pencapaian ini.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait di Kabupaten kepulauan Mentawai diketahui bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persentase realisasi keuangan. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan tenaga ahli atau pengelola anggaran yang berpengalaman bisa menjadi faktor penghambat. (Ijtihad, R., & Harsono, I. 2024) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, dan kualitas manajemen fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di daerah yang memiliki tingkat realisasi keuangan tinggi, seperti Kabupaten Solok, kemungkinan ada praktik manajerial yang baik, sistem pengawasan yang efisien, kapabilitas yang lebih tinggi dalam menyusun dan melaksanakan program pembanguna serta transparansi dalam penggunaan anggaran. Kabupaten dengan realisasi keuangan lebih rendah, seperti Kepulauan Mentawai, tentu menghadapi tantangan lebih besar dalam hal pengelolaan anggaran.

Faktor kedua adalah kondisi geografis. Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan kondisi geografis yang terisolasi, bisa menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pembangunan. (Silalahi dan Sudarwati, 2018) menemukan bahwa daerah yang terisolasi atau dengan infrastruktur terbatas, seperti Kepulauan Mentawai, cenderung mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program pembangunan. Tantangan seperti aksesibilitas, distribusi sumber daya, dan pengelolaan proyek pembangunan lebih rumit dan membutuhkan upaya khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Wang et al., 2023) juga menemukan bahwa daerah dengan tantangan geografis seperti kepulauan sering kali mengalami keterlambatan pencairan dana dan distribusi anggaran ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Ini seringkali berdampak pada rendahnya realisasi anggaran.

Selanjutnya faktor ke tiga adalah kapabilitas pemerintah daerah. (Ijtihad, R., & Harsono, I. 2024) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan informasi, dan kualitas manajemen fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di daerah yang memiliki tingkat realisasi keuangan tinggi, seperti Kabupaten Solok, kemungkinan ada praktik manajerial yang baik, sistem pengawasan yang efisien, kapabilitas yang lebih tinggi dalam menyusun dan melaksanakan program pembanguna serta transparansi dalam penggunaan anggaran. (Iskandar dan Wibowo, 2020) menyatakan bahwa kabupaten dengan realisasi keuangan rendah membutuhkan peningkatan kapasitas administrasi dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan digunakan secara efektif.

Sementara itu, untuk daerah dengan realisasi keuangan rendah dibutuhkan kebijakan desentralisasi dan Kemandirian Keuangan Daerah. (Pahlawan dan Suryadi, 2021) menyatakan bahwa daerah yang

memiliki tingkat realisasi anggaran lebih rendah mungkin membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih adaptif untuk mengatasi ketidakseimbangan sumber daya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan yang di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 tergolong baik, dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 95,18% dan realisasi keuangan sebesar 91,28%. Ini menunjukkan bahwa secara umum, program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Meskipun capaian keseluruhan realisasi fisik dan keuangan relatif baik, masih terdapat variasi antara kabupaten/kota. Variasi terjadi, di mana beberapa daerah memiliki persentase realisasi lebih rendah dari pada kabupaten/kota lainnya. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas manajerial dan efisiensi perencanaan, minimnya koordinasi, efisiensi birokrasi, serta dukungan sumber daya.
3. Keberhasilan realisasi fisik dan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk perencanaan yang matang, efektivitas pengawasan, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan. Daerah dengan pengelolaan yang lebih terstruktur cenderung mencapai target yang lebih tinggi.
4. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan bagi Kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Beberapa daerah yang mengalami kendala dalam realisasi anggaran dapat menggunakan temuan ini untuk mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat dilakukan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarsektor dalam perencanaan dan implementasi anggaran.
2. Mekanisme pengawasan dan evaluasi harus diperkuat untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas melalui pelatihan.

## REFERENSI

- Baccarini, D. 1999. "The Logical Framework Method for Defining Project Success." *Project Management Journal* 30(4):25–32.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. *Pedoman Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Keuangan Daerah Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. 2021. *Laporan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2021*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bastian, I. 2019. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cicmil, S., T. Williams, J. Thomas, and D. Hodgson. 2006. "Rethinking Project Management: Researching the Actuality of Projects." *International Journal of Project Management* 24(8):675–86.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.

ANALISIS REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI SUMATERA BARAT  
Muhammad Fajri Zalmi, Rivdya Eliza

- Ijtihad, R., & Harsono, I. 2024. "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. , 18(1), 41-50." *Ganec Swara* 18(1):41–50.
- Iskandar, M., and A. Wibowo. 2020. "Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Realisasi Pembangunan: Analisis Kasus Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Administrasi Publik* 18(1):98–112.
- Jha, K. N., and K. C. Iyer. 2006. "Critical Factors Affecting Quality Performance in Construction Projects." *Total Quality Management and Business Excellence* 17(9):1155–70.
- Kementerian Keuangan. 2022. *Laporan Keuangan Dan Evaluasi APBD 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kerzner, H. 2025. *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. John Wiley & Sons.
- Kuncoro, M. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meredith, J. R., Shafer S.M, and Mantel Jr S.J. 2017. *Project Management: A Strategic Managerial Approach*. John Wiley & Sons.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Müller, R., and K. Jugdev. 2012. "Critical Success Factors in Projects." *International Journal of Project Management* 30(5):1–7.
- OECD. 2019. *Public Sector Integrity: A Framework for Implementation*. Paris: OECD publishing.
- Pahlawan, S., and T. Suryadi. 2021. "Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah: Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal* 12(3):210–25.
- Pratama, M. A. A. P., H. Rafdi, and A. N. Patty. 2024. "Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 3(4).
- Putri, A., and D. Santoso. 2023. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Radiansyah, A., N. Baroroh, F. Fatmah, D. Hulu, ... F., and F. Nugroho. 2023. *Manajemen Risiko Perusahaan: Teori & Studi Kasus*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rivan, A., and I. R. Maksum. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. , 9(2), 92-100." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9(2):92–100.
- Selvia, D. E., and F. I. Arza. 2023. "Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5(3).
- Setyowati, L. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah: Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Silalahi, S. A. F., and Y. Sudarwati. 2018. *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau Dan Provinsi Maluku Utara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, B. 2021. *Suharyanto, B. (2021). Dampak Geografi Terhadap Pembangunan Daerah. Surabaya: Unair Press*. Surabaya: Unair Press.

- Syafrizal. 2020. *Perencanaan Dan Implementasi Anggaran Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Todaro, M. P., and S. C. Smith. 2021. *Economic Development*. New York: Pearson.
- UNDP. 2021. *Sustainable Development Report 2021*. New York: UNDP.
- Wang, C., M. Zhang, A. Sesunan, and L. Yolanda. 2023. "Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia." *Kemdikbud* 4(2):1–7.
- World Bank. 2020. *Infrastructure Development Report in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank.
- Yin, R. K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods*. Los Angeles: Sage Publications.
- Zwikael, O., and J. R. Smyrk. 2011. *Project Management For The Creation of Organisational Value*. London: Springer.